

## Vietnam Menghadapi Masalah Surplus Pria

VIETNAM(IM)-Kekurangan perempuan di Vietnam telah menjadi topik perbincangan rutin di meja makan. Beberapa tahun yang lalu, jika seorang perempuan berusia pertengahan 20-an belum menikah, prospek pernikahannya merupakan salah satu kekhawatiran terbesar bagi keluarganya.

Tapi situasinya sekarang mulai berubah. Kekhawatiran banyak keluarga sekarang semakin ditujukan pada anak lelaki mereka. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang menyibukkan pikiran mereka: Apakah pendidikannya cukup? Apakah penghasilannya cukup? Apakah dia bisa bergaul dan bersikap santun?

Jika jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini negatif, maka prospeknya untuk mendapatkan pasangan akan berkurang. Berdasarkan sensus tahun 2019, terdapat 1,2 juta lebih banyak anak laki-laki dibandingkan anak perempuan di Vietnam yang berusia di bawah 19 tahun.

Vietnam berada di posisi yang sama dengan negara-negara seperti Cina dan India dalam hal rasio jenis kelamin yang tidak seimbang. Konsekuensi sosial dari perkembangan ini sangat besar bagi laki-laki, yang tidak dapat menemukan perempuan sebagai pasangan hidup, serta bagi perempuan yang dihadapkan pada tantangan besar karena menjadi "komoditas" yang diperibudatkan.

Sebuah studi tahun 2018 berjudul "Ketidakseimbangan Gender di Vietnam: Masalah dan Solusi" mengidentifikasi beberapa penyebab ketidakseimbangan antara anak laki-laki dan perempuan di Vietnam. Ketidakseimbangan ini sebagian disebabkan oleh preferensi tradisional masyarakat terhadap anak laki-laki.

Secara tradisional, anak laki-laki dianggap lebih berharga daripada anak perempuan. Selain itu, tradisi Konfusianisme, yang punya pengaruh kuat pada masyarakat Vietnam, menekankan peran gender dan subordinasi perempuan terhadap laki-laki.

Ketika seorang perempuan menikah di Vietnam, mereka biasanya akan bergabung dengan keluarga suaminya dan dengan demikian "hilang" dari keluarga mereka sendiri. Karena negara tidak menyediakan jaring pengaman sosial yang memadai, orang tua bergantung pada anak laki-laki mereka sebagai jaminan di hari tua.

Meluasnya penggunaan metode pengujian prenatal, seperti pencitraan USG yang memungkinkan orang mengetahui jenis kelamin bayi yang belum lahir, memperbesar ketidakseimbangan gender.

Pada tahun 2003 pemerintah Vietnam telah melarang pengujian USG untuk mengidentifikasi jenis kelamin pada bayi yang belum lahir. Saat ini, sekitar 83% ibu hamil di Vietnam sudah mengetahui jenis kelamin anaknya sebelum lahir, menurut laporan Kesetaraan Gender Negara PBB 2021.

Sebagian besar keluarga di Vietnam menginginkan anak laki-laki, juga untuk meneruskan garis keturunan. Akibatnya, terjadi peningkatan aborsi pada janin perempuan, terutama pada kehamilan kedua atau ketiga.

Meluasnya penggunaan metode pengujian prenatal, seperti pencitraan USG yang memungkinkan orang mengetahui jenis kelamin bayi yang belum lahir, memperbesar ketidakseimbangan gender. Padahal, pemerintah Vietnam sejak 2003 sudah melarang pengujian USG untuk mengidentifikasi jenis kelamin pada bayi yang belum lahir.

Saat ini, sekitar 83% ibu hamil di Vietnam sudah mengetahui jenis kelamin anaknya sebelum lahir, menurut laporan Kesetaraan Gender Negara PBB 2021. Sebagian besar keluarga di Vietnam menginginkan anak laki-laki, juga untuk meneruskan garis keturunan. Akibatnya, terjadi peningkatan aborsi pada janin perempuan, terutama pada kehamilan kedua atau ketiga.

Konsekuensinya bagi para ibu sudah jelas, kata Thu Hong Khuat, direktur Institut Studi Pembangunan Sosial di Hanoi. "Perempuan Vietnam berada di bawah tekanan ekstrem untuk melahirkan anak laki-laki. Jika mereka tidak berhasil, suami dan keluarga mereka kemungkinan besar akan memperlakukan mereka dengan buruk, terutama di daerah pedesaan," katanya kepada DW.

Aborsi janin perempuan telah meningkat di Vietnam sejak teknologi USG diperkenalkan secara nasional. Perkiraan PBB menunjukkan kesenjangan populasi antara laki-laki dan perempuan dalam kelompok usia 20-39 tahun akan meningkat dari 3,5% saat ini menjadi sekitar 10% pada tahun 2059. ● gul



## SIPRUS, ISRAEL, DAN YUNANI TINGKATKAN KERJA SAMA ENERGI

Presiden Siprus Nikos Christodoulides (tengah) berjabat tangan dengan Perdana Menteri Yunani Kyriakos Mitsotakis (kanan) dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Istana Kepresidenan di Nicosia, Siprus, pada Senin (4/9). Siprus, Yunani, dan Israel sepakat untuk mengintensifkan kerja sama di koridor energi dari Mediterania Timur hingga Eropa.

## Putin Bersikukuh tak Perbarui Kesepakatan Biji-bijian sampai Barat Penuhi Tuntutan

Putin mengeluhkan Barat masih belum memenuhi tuntutan Rusia.

**SOCHI(IM)** - Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan pada Senin (4/9), kesepakatan koridor gandum Laut Hitam (BSGI) tidak akan dipulihkan sampai Barat memenuhi tuntutan Moskwa. Rusia menolak untuk memperpanjang kesepakatan tersebut pada bulan Juli, dan mengeluhkan bahwa perjanjian yang sama tidak akan berjalan. Hal itu disebabkan poin yang menjanjikan untuk menghilangkan hambatan terhadap ekspor makanan dan pupuk Rusia belum dihormati. Rusia mengatakan bahwa

masih ada saja pembatasan pengiriman dan asuransi menghambat perdagangan pertanian dari negaranya. Meskipun Rusia telah mengirimkan gandum dalam jumlah yang sangat besar sejak tahun lalu. Putin mengulangi keluhan-keluhan tersebut pada hari Senin (4/9) kepada Erdogan, sambil mengatakan kepada para wartawan bahwa jika komitmen-komitmen tersebut dihormati, Rusia dapat kembali ke kesepakatan tersebut "dalam beberapa hari."

Erdogan juga menyatakan harapannya bahwa sebuah terobosan dapat segera ter-

jadi. Dia mengatakan Turki dan PBB - yang menjadi perantara kesepakatan awal - telah menyusun paket proposal baru untuk membuka blokir masalah ini.

"Kami percaya bahwa kami akan mencapai solusi yang akan memenuhi harapan dalam waktu singkat," kata Erdogan pada konferensi pers yang diadakan bersama Putin di resor Sochi, Rusia. Sementara itu, Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Eropa bersama-sama menekan Uni Emirat Arab untuk menghentikan perdagangan dengan Rusia.

Hal ini terungkap sebagaimana dilaporkan Wall Street Journal (WSJ) pada Senin (4/9), dengan mengutip para pejabat AS dan Eropa.

Seorang pejabat UEA, menanggapi permintaan komentar dari Reuters, mengatakan bahwa UEA "secara ketat mematuhi sanksi-sanksi PBB dan memiliki proses-proses yang jelas dan kuat untuk berurusan dengan entitas-entitas yang terkena sanksi."

UEA "terus memantau ekspor produk penggunaan ganda," yang memiliki aplikasi sipil dan militer, di bawah kerangka hukum pengendalian ekspor, demikian imbuh pejabat itu. UEA, anggota aliansi minyak OPEC+ yang mencakup Rusia, telah mempertahankan hubungan baik dengan Moskwa. Hubungan itu tetap dipertahankan, meskipun ada tekanan dari Barat, untuk membantu mengisolasi Rusia atas invasi ke Ukraina yang

dimulai pada Februari 2022. Hal ini tidak sesuai dengan sanksi global yang dijatuhkan pada Moskwa.

Departemen Luar Negeri AS menolak berkomentar ketika ditanya tentang laporan WSJ. Namun pejabat UEA menambahkan bahwa UEA tetap berdialog secara dekat dengan mitra-mitra internasional termasuk AS dan Uni Eropa mengenai konflik di Ukraina dan implikasinya terhadap ekonomi global.

"Bank-bank UEA, di bawah pengawasan Bank Sentral dan otoritas terkait lainnya, memantau kepatuhan terhadap sanksi yang dijatuhkan kepada Rusia untuk mencegah pelanggaran hukum internasional," kata pejabat UEA. ● tom

## Kim Jong-un Akan Bertemu Vladimir Putin untuk Negosiasi Pasokan Senjata

**SEOUL(IM)** - Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un berencana melakukan perjalanan ke Rusia bulan ini untuk bertemu Presiden Vladimir Putin dan membahas kemungkinan memasok senjata ke Moskwa untuk perang di Ukraina. Laporan itu muncul di saat Rusia mengatakan pihaknya sedang mengupayakan hubungan militer yang lebih erat dengan Korea Utara.

Dalam perjalanan yang jarang terjadi ke luar negeri, Kim akan melakukan perjalanan dari Pyongyang, mungkin dengan kereta lapis baja, ke Vladivostok, di Pantai Pasifik Rusia, di mana ia akan bertemu Putin, demikian dilaporkan New York Times pada Selasa, (5/9) mengutip sumber-sumber Amerika Serikat (AS) dan sekutunya.

Saat berada di Vladivostok, sebuah kota pelabuhan tidak jauh dari Korea Utara, kedua pemimpin akan membahas pengiriman rudal antitank oleh Kim ke Rusia sebagai imbalan atas teknologi canggih Moskwa untuk satelit dan kapal selam bertenaga nuklir, surat kabar itu melaporkan.

Pada saat Amerika Serikat menyatakan keprihatinannya mengenai meningkatnya hubungan militer antara kedua negara, berita mengenai rencana kunjungan Kim muncul setelah Rusia mengatakan pihaknya sedang mendiskusikan diadakannya latihan militer gabungan dengan Korea Utara.

Kremlin mengatakan pekan lalu bahwa Moskwa bermaksud untuk memperdalam "hubungan saling menghormati" dengan Pyongyang, salah satu sekutu dekat Perang Dinginnya dan juga salah satu dari segelintir negara yang mendukung aneksasi Rusia atas sebagian wilayah Ukraina pada 2022.

The New York Times melaporkan bahwa Kim kemungkinan bisa pergi ke Moskwa, meski hal itu belum bisa dipastikan.

Ayah Kim, Kim Jong Il yang tertutup dan terkenal menghindari pesawat dan

hanya bepergian dengan kereta lapis baja, terakhir kali mengunjungi Rusia hanya beberapa bulan sebelum kematiannya pada 2011.

Pada Juli, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mengunjungi Korea Utara untuk memperingati 70 tahun berakhirnya Perang Korea, yang dirayakan di Korea Utara sebagai "Hari Kemenangan". Badan Intelijen Nasional Korea Selatan mengatakan bahwa Shoigu ia tampaknya mengadakan pertemuan pribadi dengan Kim, menurut laporan Yonhap.

Amerika Serikat mengatakan pada pekan lalu bahwa mereka khawatir bahwa perundingan senjata antara Rusia dan Korea Utara mengalami kemajuan yang aktif, dan bahwa Shoigu telah mencoba selama kunjungannya untuk meyakinkan Pyongyang agar menjual amunisi artileri ke Rusia.

Pada Sabtu, (2/9) duta besar Rusia untuk Korea Utara, Alexander Matsegora, mengatakan kepada kantor berita TASS bahwa dia tidak mengetahui adanya rencana bagi Korea Utara untuk berpartisipasi dalam latihan militer trilateral dengan Tiongkok dan Rusia, namun menurutnya hal itu akan "pantas" jika dilakukan. Mengingat latihan yang dipimpin AS di wilayah tersebut, Rusia dan Korea Utara baru-baru ini menyerukan hubungan militer yang lebih erat namun Korea Utara membantah melakukan "kesepakatan senjata" dengan Rusia.

Amerika Serikat baru-baru ini menjatuhkan sanksi terhadap tiga entitas yang dituduh terkait dengan kesepakatan senjata antara Korea Utara dan Rusia.

Korea Utara telah melakukan enam uji coba nuklir sejak 2006 dan telah menguji berbagai rudal selama beberapa tahun terakhir namun jarang mengadakan latihan militer dengan negara tetangganya. Amerika Serikat dan sekutunya, Korea Selatan, mengadakan latihan militer rutin, yang dicekam Korea Utara sebagai persiapan perang melawannya. ● gul

## Kuba Bongkar Sindikat Pengiriman Warganya untuk Bertempur di Ukraina

**HAVANA(IM)** - Pemerintah Kuba telah mengidentifikasi terduga jaringan perdagangan manusia yang bertujuan merekrut warga negaranya untuk bertempur dalam perang yang dipicu invasi Rusia di Ukraina.

Jaringan perdagangan manusia itu beroperasi dari dalam wilayah Rusia.

Seperti dilansir AFP, Selasa (5/9), hal tersebut diungkapkan oleh Kementerian Luar Negeri Kuba dalam pernyataan yang dirilis Senin (4/9) waktu setempat. Disebutkan bahwa warga-warga Kuba diperdagangkan dan direkrut untuk bertempur bagi militer Rusia dalam perang di Ukraina.

Kementerian Luar Negeri Kuba menyatakan bahwa pemerintah berupaya membongkar jaringan perdagangan manusia yang beroperasi dari Rusia untuk menggabungkan warga

Kuba yang tinggal di sana, dan bahkan beberapa orang dari Kuba, ke dalam pasukan militer yang terlibat dalam operasi militer di Ukraina.

Pemerintah Kuba, sebut Kementerian Luar Negeri, telah memulai proses pidana terhadap mereka yang melakukan perdagangan manusia.

Menteri Luar Negeri (Menlu) Kuba Bruno Rodriguez, dalam pernyataan via media sosial X atau Twitter, menyebut pemerintah 'bertindak dengan kekuatan hukum penuh' terhadap praktik perdagangan manusia. "Kuba bukan bagian dari perang di Ukraina," tegas Kementerian Luar Negeri Kuba dalam pernyataannya.

Ditegaskan juga bahwa Kuba akan mengambil tindakan terhadap siapa saja yang berpartisipasi dalam segala bentuk perdagangan manusia untuk tujuan

perekrutan atau tentara bayaran bagi warga negara Kuba untuk menggunakan senjata melawan negara mana pun.

Belum ada tanggapan resmi dari Rusia atas laporan tersebut.

Moskow dan Havana telah meningkatkan hubungan baru-baru ini, dengan Presiden Miguel Diaz-Canel bertemu Presiden Vladimir Putin di Moskwa pada akhir tahun lalu. Pada Juni, Menteri Pertahanan (Menhan) Kuba Alvaro Lopez Miera dijemu oleh Menhan Rusia Sergei Shoigu.

Ukraina mengatakan, pada Senin (4/9) waktu setempat, bahwa pihaknya mendapatkan sejumlah kemajuan dalam melawan pasukan militer Rusia di bagian selatan dan timur wilayahnya, seiring dengan upaya mereka melancarkan serangan balasan. ● ans



**HUAWEI LUNCURKAN PUSAT DATA CLOUD BARU DI SAUDI**  
Perwakilan dari Huawei dan perusahaan Saudi menandatangani MoU pada Huawei Cloud Summit Arab Saudi 2023 di Riyadh, Arab Saudi, Senin (4/9). Raksasa teknologi Tiongkok Huawei itu mengumumkan pembukaan pusat data cloud di Riyadh, sebagai bagian dari upayanya untuk memperluas penawaran layanan online di Timur Tengah.

## Atas Nama Kecantikan, Kehidupan Warga Miskin Kota New Delhi Dihancurkan

**NEW DELHI(IM)** - Jelang penyelenggaraan KTT G20 di New Delhi pekan ini, Ibu Kota India ini terus mempercantik diri. Suasana kota yang padat macet dan kumuh disulap dengan taman dan lampu-lampu jalan yang indah disertai bangunan dan tembok yang dicat dengan mural yang cerah.

Banyak orang miskin di kota itu mengatakan mereka telah dihapus dan ditutup-tutupi begitu saja. Hewan liar seperti sapi, anjing-anjing liar dan monyet-monyet yang telah disingkirkan dari beberapa sudut kota demi pertemuan puncak negara-negara G20 akhir pekan ini. Pemerintah Perdana Menteri Narendra Modi berupaya keras untuk membuat New Delhi berkilau, dengan sebuah "proyek kecantikan" berbiaya sebesar 120 juta dolar AS.

Diharapkan cara ini akan membantu memamerkan kecemerlangan dan kehebatan budaya India. Tetapi faktanya bagi banyak pedagang kaki lima dan mereka yang hidup berdesakan di kota-kota kumuh New Delhi, perubahan ini berarti pengusuran. Termasuk ancaman hilangnya mata pencaharian, yang menimbulkan pertanyaan tentang kebijakan pemerintah dalam menangani kemiskinan. Di kota yang berpenduduk lebih dari 20 juta orang ini, sensus tahun 2011 menyebutkan bahwa jumlah tunawisma mencapai 47.000 orang.

Namun para aktivis mengatakan bahwa angka tersebut terlalu rendah dan jumlah yang sebenarnya setidaknya mencapai 150.000 orang. Sejak Januari 2023, ratusan rumah dan kios-kios di pinggir jalan telah dihancurkan, membuat ribuan orang kehilangan tempat tinggal. Puluhan rumah gubuk diratakan dengan tanah, dan banyak warga yang menerima pembentahan pengusuran hanya beberapa saat sebelum pembongkaran dilakukan.

Pihak berwenang mengatakan bahwa pembongkaran tersebut dilakukan terhadap "pemukiman ilegal", namun para aktivis hak asasi manusia dan mereka yang digusur mempertanyakan kebijakan tersebut dan menuduh bahwa kebijakan tersebut telah mendorong ribuan orang lainnya menjadi tunawisma.

Pembongkaran serupa juga telah dilakukan di kota-kota lain di India seperti Mumbai dan Kolkata yang menjadi tuan rumah berbagai acara G20 menjelang KTT akhir pekan ini. Para aktivis mengatakan bahwa hal ini lebih dari sekedar kasus tidak terlihat, tidak terpikirkan. Abdul Shakel, dari kelompok

aktivis Basti Suraksha Manch, atau Save Colony Forum, mengatakan bahwa "atas nama kecantikan, kehidupan masyarakat miskin kota dihancurkan."

"Uang yang digunakan untuk G20 adalah uang para pembayar pajak. Semua orang membayar pajak. Uang yang sama digunakan untuk menggosur mereka. Ini tidak masuk akal," katanya. KTT G20 selama dua hari ini akan berlangsung di gedung Bharat Mandapam yang baru saja dibangun, sebuah pusat hall pameran yang luas di jantung kota New Delhi. Area ini juga berada di dekat monumen Gerbang India yang terkenal - dan banyak pemimpin dunia diperkirakan akan hadir. Perkumpulan G20 mencakup 19 negara terkaya di dunia ditambah dengan Uni Eropa. India saat ini memegang jabatan sebagai ketua, yang bergilir setiap tahunnya di antara para anggota.

Pada bulan Juli, sebuah laporan dari Concerned Citizens Collective, sebuah kelompok aktivis hak asasi manusia, menemukan bahwa persiapan untuk KTT G20 telah menyebabkan perpindahan hampir 300.000 orang. Terutama dari perubahan lingkungan kota yang akan dikunjungi oleh para pemimpin dan diplomat asing selama berbagai pertemuan. Sedikitnya 25 kampung kumuh dan beberapa tempat penampungan malam untuk para tunawisma diratakan dengan tanah dan diubah menjadi taman, kata laporan tersebut. Laporan itu juga menambahkan bahwa pemerintah gagal menyediakan tempat penampungan atau tempat tinggal alternatif bagi para tunawisma baru.

Bulan lalu, polisi India turun tangan untuk menghentikan sebuah pertemuan para aktivis, akademisi dan politisi terkemuka yang mengkritik Modi dan peran pemerintahnya dalam menjadi tuan rumah KTT G20 dan mempertanyakan kepentingan siapa yang akan diuntungkan oleh KTT tersebut. "Saya dapat melihat para tunawisma di jalanan dan sekarang para tunawisma juga tidak diizinkan untuk tinggal di jalanan," kata Rekha Devi, seorang warga New Delhi yang menghadiri pertemuan 20 Agustus.

Devi, yang rumahnya dihancurkan dalam salah satu aksi tersebut, mengatakan bahwa pihak berwenang menolak untuk mempertimbangkan dokumentasi yang ia tunjukkan sebagai bukti. Padahal ia dan keluarganya telah tinggal di rumah yang sama selama hampir 100 tahun. ● ans